
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN TERPADU

Deni Hardianto¹

Abstrak

Sudah lebih dari sengah abad bangsa Indonesia merdeka, tapi sampai saat ini justru bangsa Indonesia semakin mengalami degradasi karakter kebangsaan. Meningkatnya tindak kriminal dan semakin menjadi-jadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bangsa ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang kehilangan jati diri. Belum lagi ancaman disintegrasi bangsa yang menggejala di berbagai daerah semakin menguatkan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis karakter kebangsaan. Pendidikan yang semestinya menjadi motor "perbaikan" sekaligus "pembentukan" karakter bangsa justru mengalami kegagalannya. Meskipun mengalami kegagalan, pendidikan masih menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Reorientasi pendidikan dengan mendorong peran pemerintah lebih optimal serta revitalisasi pendidik merupakan langkah awal yang harus ditempuh untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perbaikan dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan terpadu merupakan sebuah tawaran solutif atas implementasi pembelajaran yang berlangsung selama ini yang telah menyebabkan pendidikan terdiktomi dan parsial.

Kata kunci: membangun karakter bangsa, pendidikan terpadu

Pendahuluan

Sejak tumbangannya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 sampai pemerintahan sekarang kondisi bangsa Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional belum ada terobosan yang sangat fundamental terhadap penyelesaian krisis dan arah pembangunan bangsa kedepan, pemerintah masih memprioritaskan pembangunan jangka pendek dan menengah dan itu-pun masih dalam bentuk *fisik* dan *publis* yang kental dengan kepentingan politik.

Krisis yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya krisis ekonomi maupun politik, tapi lebih dari itu bangsa kita tengah menghadapi krisis karakter/ jati diri.

¹ Staf pengajar jurusan KTP FIP

Berbagai peristiwa atau kejadian yang sering berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang kita saksikan melalui TV maupun media cetak menunjukkan betapa masyarakat kita tengah mengalami degradasi jati diri. Seiring perjalanan waktu moral bangsa terasa semakin amburadul, huru-hara dan kesewenangan terjadi dimanamana, tata krama pun hilang, nyawa seperti tak ada harga, korupsi menjadi-jadi bahkan telah dilakukan terang-terangan dan berjamaah (*meminjam istilah Taufik Ismail*). Berbagai bentuk kerusakan yang diikuti penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di berbagai daerah. Selain dari itu kutuhan dan ketahanan bangsa-pun terancam disintegrasi dengan terjadinya beberapa konflik di berbagai daerah seperti di Aceh, Maluku dan Papua.

Masyarakat Indonesia seperti kehilangan prinsip dan *nation* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep Bhenika Tunggal Ika sudah mulai luntur dari jiwa-jiwa generasi sekarang. Akan tetapi semua proses yang terjadi saat ini boleh jadi memberikan pendidikan yang berarti bagi masyarakat Indonesia dalam mencari jati diri. Menurut Sarjono Djatiman, bangsa Indonesia baru dalam proses menjadi Indonesia. Pada masa lalu, para pendiri bangsa ini melakukan proses menjadi Indonesia dimulai dari para elite dengan proses sukarela. Masing-masing menyatakan dirinya lalu mencari unsur-unsur yang bisa dipakai sebagai pangkal tolak *nation* Indonesia. *Nation* Indonesia dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Inilah yang menjadi harapan pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki jati diri.

Jika Pendiri bangsa ini (*the founding fathers*) masih sempat menyaksikan kondisi bangsa saat ini tentu mereka akan sangat sedih dan menyesal. Bangsa Indonesia yang merdeka dengan mengorbankan segenap harta, jiwa dan raga harus menjadi bangsa yang tidak memiliki karakter (*izzah*), dan kehilangan prinsip kebangsaan. Rentetannya peristiwa kerusakan yang diikuti berbagai gejolak yang terjadi (khususnya di Aceh, Papua, Sulawesi Selatan) akhir-akhir ini, merupakan fenomena yang dikhawatirkan akan mengarah pada disintegrasi bangsa. Terjadinya

fenomena ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sedang mengalami *Crisis Nation Character*.

Krisis karakter yang dialami bangsa saat ini disebabkan kerusakan individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga terbentuk budaya/kebiasaan. Budaya inilah yang telah menginternal dalam sanubari masyarakat Indonesia dan menjadi karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia ditentukan oleh ciri manusia Indonesia itu sendiri, Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia dijajah lebih dari 3 abad, dampak dari penjajahan tersebut boleh jadi telah membentuk karakter tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yaitu karakter masyarakat terjajah. Karakter yang merupakan warisan penjajah dan dijadikan budaya bagi masyarakat Indonesia sebagaimana Mochtar Lubis mengemukakan ciri manusia Indonesia yang antara lain: 1) munafik, 2) segan dan enggan bertanggung jawab, 3) berjiwa feodal, 4) percaya tahayul, 5) artistik, 6) berwatak lemah (cengeng), 7) tidak hemat, 8) kurang gigih, serta 9) tidak terbiasa bekerja keras. Pernyataan itu tidaklah sepenuhnya dapat kita benarkan karena sejarah juga mencatat pengorbanan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya, itu menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi yang dimiliki masyarakat Indonesia waktu itu. Namun jujur kita mengakui bahwa ciri yang di kemukakan diatas merupakan kecendrungan umum dari masyarakat Indonesia saat ini.

Terlepas dari itu semua apakah mentalitas bangsa merupakan warisan penjajah feodal atau justru merupakan kegagalan pendidikan Indonesia dalam membentk karakternya. Pendidikan seharusnya menjadi media "perbaikan" sekaligus "pembentukan" karakter masyarakat Indonesia sesungguhnya. Lalu, apa yang telah dilakukan pendidikan selama ini?

Kegagalan Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa

Permasalahan pendidikan bangsa ini tidak pernah selesai, ada gejala yang tidak beres dalam dunia pendidikan seperti; siswa yang tawuran, siswa yang menjadi korban narkoba, siswa yang tidak bersemangat belajar, siswa yang memperkosa

temannya sendiri dan masih banyak lagi permasalahan pendidikan yang sedang berlangsung belum lagi persoalan yang terjadi pada lulusan pendidikan yang terjebak pada pengangguran atau para pelaku korupsi intelektual yang menjadi-jadi. Fenomena kriminalitas yang terjadi dalam realitas kehidupan semuanya hampir bersentuhan dengan pendidikan baik itu yang pra, saat atau pasca pendidikan. Lalu, apa yang telah dilakukan dunia pendidikan selama ini?

Dr Avip Saefullah drg M.Pd menyatakan Lembaga pendidikan di Indonesia ternyata gagal berperan sebagai pranata sosial yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan. Yang terbangun saat ini justru perilaku elite negeri yang bertolak belakang dengan nilai sosial dan kehendak masyarakat. Celakanya, model perilaku paradoksal inilah yang berkembang menjadi spirit nasional dan terkesan menjadi karakter bangsa. Lembaga pendidikan di Indonesia tidak mampu menegakkan nilai-nilai demokratis dan menyiapkan masyarakat yang kritis dengan basis pengetahuan dan kompetensi. Akumulasi dari perilaku itu kemudian juga membuat kemunduran bangsa, baik dari segi pembangunan ekonomi maupun pengembangan kualitas sumber daya manusianya (Diskusi FORMOPI 17/3/2000) .

Lebih dari tiga dasawarsa pendidikan berjalan apa adanya dengan out-put yang seadanya bahkan terkesan pendidikan kita telah mencetak manusia intelektual, alim tapi kurang bermoral, pernyataan tersebut tidak dapat kita benarkan atau kita salahkan namun kenyataannya sesungguhnya bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis moral baik di tingkat penguasa maupun rakyat jelata. Sementara itu sangat mencolok di hadapan kita bahwa pendidikan agama, budi pekerti, dan Pancasila yang dilakukan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan pendidikan Pancasila yang juga telah ditatarkan pada pejabat tinggi negara, pegawai negeri pada segala tingkatan hingga organisasi kemasyarakatan, ternyata gagal membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik dalam hal membentuk karakter bangsa. Sulitnya memberantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sulitnya mencari pimpinan sebagai panutan, dibiarkannya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, tiadanya

korelasi yang positif antara maraknya masyarakat yang pergi ke tempat ibadah dengan menurunnya tingkat KKN, rendahnya sensitivitas sosial dan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, merupakan beberapa contoh yang ada di depan mata kita. Lalu apa yang sebenarnya telah diajarkan oleh pelajaran budi pekerti, Pancasila maupun agama? Adakah kesalahan pada materi pelajarannya atau metode dan strateginya yang keliru!

Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta diakui komunitas masyarakat lainnya (*baca: internasional*). Dari sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini pendidikan berperan penting membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan gagal dalam membangun persepsi antar komunitas maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya karakter bangsa.

Kegagalan pendidikan dalam membangun karakter bangsa disebabkan banyak faktor. Karena ada banyak komponen dalam pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana maupun komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan nasional. Keseriusan pemerintah harus dibuktikan dengan aksi nyata yaitu dengan memberikan anggaran pendidikan yang memadai, meningkatkan kesejahteraan pendidik serta memberikan pengelolaan pendidikan kepada yang ahli di bidangnya dalam artian pendidikan jangan dijadikan sebagai komoditas kepentingan politik. Selain dari itu pendidik (guru) juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam

membangun mentalitas dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pendidik harus sadar bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan dan pembangaunan generasi penerus bangsa.

Kondisi bangsa sudah sedemikian rapuh, masyarakat Indonesia seperti kehilangan jati diri sementara pendidikan belum mampu bahkan dianggap gagal dalam membangun karakter bangsa. Lalu adakah jalan lain selain pendidikan untuk membangun karakter bangsa?, penulis beranggapan hanya pendidikan-lah jalan tercepat yang dapat membangaun kembali karakter kebangsaan, hanya saja pendidikan yang telah berlangsung selama ini perlu ada peninjauan atas keberhasilan dan kekurannnganya. Penulis kira tidak semua out-put pendidikan selama ini semua tidak baik, hanya saja butuh pembenahan dan perbaikan pada sisi-sisi yang lemah, perlu ada reorientasi atas visi pendidikan nasional. Krisis karakter kebangsaan saat ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dunia pendidikan, mampukah pendidikan membangun karakter bangsa yang sedang rapuh?

Membangun karakter bangsa melalui pendidikan

Untuk menjawab fenomena itu, mengapa harus ke pendidikan? Dari banyak literatur ada bukti, perilaku masyarakat amat erat kaitannya dengan tingkat pendidikannya. Teori keterkaitan perilaku masyarakat dengan tingkat pendidikan menjadi tidak sepenuhnya berlaku. Yang bisa dijadikan instrumen untuk menjelaskannya tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (*character building*). Sayang, sudah lebih dari setengah abad kita merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jelas lagi selama 32 tahun Orde Baru mengendalikan negara dengan ciri yang sentralistik, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai fokus pembangunan, perbedaan dijadikan barang tabu, kawalan "siaga" senjata dipakai sebagai legitimasi atas nama stabilitas untuk pembangunan. Pendidikan tidak diletakkan dalam konteks investasi strategis sehingga biaya pendidikan selalu dibuat minim, selalu di bawah 10 persen dari APBN.

Konsekuensinya, dampak negatif pada lambatnya pengembangan nilai-nilai dalam membangun karakter bangsa.

Dalam kondisi ini, secara tidak sadar masyarakat tergiring menjadi "manusia robot". Pada saat yang bersamaan muncul sifat serakah, keinginan jalan pintas dalam memecahkan persoalan hidup, kurang sensitif terhadap kelompok masyarakat lain yang sedang menderita, dan sebagainya. Semua itu karena terdorong kuat oleh dampak pembangunan terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi, yang pada gilirannya menuju ke arah budaya konsumerisme. *Gap* kaya-miskin menjadi sangat lebar. Ketidakpuasan timbul di mana-mana. Krisis ekonomi menjalar cepat pada krisis politik. Dari sisi sosiologi pembangunan, meminjam thesis Rostow yang menekankan pada pendekatan prasyarat pembangunan sehingga muncul lima tahap pembangunan itu, sangat jelas bila dipakai untuk memahami fenomena yang tidak berjalan sebagaimana mestinya itu. Jadi lengkap sudah. Dari kaca mata ini, tidak terlalu keliru bila kerusuhan yang berujung pada gejala disintegrasi bangsa akhirnya bersumber dari lemahnya pendidikan dalam membentuk karakter bangsa.

Dalam konteks memahami fenomena itu, menarik apa yang disarankan Unesco bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: (a) belajar untuk tahu (*learn to know*), (b) belajar untuk berbuat (*learn to do*) dan (c) belajar untuk hidup bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih terarah membentuk *having*, agar sumberdaya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau *skill*. Unsur ketiga lebih terarah *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Kini, unsur itu menjadi amat penting. Pembangkitan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme sempit; penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara; pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan sebagainya, merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya dimulai sejak Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penyesuaian dalam materi dan cara penyampaiannya tentu saja diperlukan.

Apakah pendidikan sekarang ini belum memberikan unsur itu. Secara materi, yang tertuang dalam kurikulum, mungkin sudah. Namun dalam konteks proses pendidikan untuk membentuk karakter bangsa secara benar, tampaknya selama ini kurang atau bahkan tidak diperhatikan dengan saksama. Sebagai contoh pendidikan Pancasila yang diwujudkan dalam mata ajaran sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Penyampaian yang serba verbalitas, secara signifikan tidak akan pernah membentuk karakter bangsa. Berbagai persoalan yang ada, akhirnya cenderung dibenahi di perguruan tinggi. Mata kuliah seperti ilmu sosial dasar, etika akademik, agama dan Pancasila bahkan sampai dituangkan dalam kurikulum selama dua semester di banyak perguruan tinggi.

Pelurusan benang merah mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi perlu segera dimulai. Tiga unsur pendidikan yang harus ada seperti disarankan Unesco, perlu dijabarkan dalam kurikulum mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pembinaan bukan berarti harus merombak kurikulum. Bisa dengan cara melakukan revitalisasi isi pelajaran dan metode pengajaran. Revitalisasi isi pelajaran dan metode pengajaran dalam implementasinya harus mencoba untuk memadukan antara teori dan aplikasi, teks dan konteks.

Implementasi kurikulum dalam pembelajaran selama ini berjalan dikotomi (terjadi pemisahan antara teori dan praksis/ apa yang diajarkan di institusi pendidikan kadang bertentangan dengan realita kehidupan) terjadinya dikotomi ilmu dan pengetahuan inilah yang memunculkan berbagai problematika dalam pendidikan. Pendidikan yang hanya dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan yang bersifat formal dan mengabaikan idealisme yang mencerminkan proses-proses pemenuhan tugas-tugas kemanusiaan. menurut hemat penulis menyebabkan pendidikan kita kehilangan ruh kebenaran.

Pendidikan Terpadu

Reorientasi pendidikan perlu segera dilakukan yaitu dengan melakukan tinjauan atas pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran selama ini, pendidikan kita

berjalan apa adanya dengan output seadanya. Sehingga dalam pembelajaran tidak terjadi internalisasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya parsialisasi ilmu pengetahuan telah mengakibatkan pendidikan kurang bermakna, banyak energi dan waktu yang tebuang percuma tapi kebermanfaatannya dan kebermaknaan ilmu yang diajarkan tidak memberikan dampak yang berarti. Terjadinya pemisahan apa yang diajarkan di sekolah dengan realita kehidupan membuat pendidikan kita tidak memiliki karakter dan terkesan paradoks.

Untuk itu paradigma pendidikan terpadu perlu digalakkan yaitu dengan memadukan antara teori dan praktek, antara teks dan konteks, selama ini pendidikan kita berlangsung dikotomi antara teks dan konteks, antara teori dan praktek. Pemisahan ini menyebabkan pemahaman menjadi parsial dan terpisah-pisah dan pelajaran hanya di pahami sebatas formalitas saja. Sehingga tidak ada pengaruh yang berarti ketika orang belajar tentang budi pekerti atau belajar tentang Pancasila. Karena nilai yang diajarkan hanya sebatas normatif saja. Pendidikan terpadu dibangun atas kesadaran dan pencarian kebenaran ilmu pengetahuan.

Pendidikan sudah harus mengajarkan epistemologi ilmu tentang pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Krisis kebenaran ilmu dan disfungsi ilmu tidak terjadi, orang harusnya tahu kenapa dia harus belajar Pancasila dan cara penerapannya, kenapa harus belajar biologi dan implementasinya. Pendidikan harus menjadi proses konsientisasi (penyadaran) dan sebagai praktek kemerdekaan. Dalam proses konsientisasi pendidikan tidak saja diarahkan pada realitas obyektif dan aktual, akan tetapi juga pada proses penyadaran akan dirinya sebagai manusia yang memiliki jati diri/ karakter. Pendidikan yang tidak diarahkan pada dua kesadaran ini, sebenarnya telah menempatkan pendidikan sebagai proses penindasan dan praktek pemerkosaan terhadap hak-hak hidup yang manusiawi. Dan akibat lebih lanjut pendidikan akan membawa peserta didik hanya untuk hidup dan tidak membawa kepada *the process of being/ becoming*

Penutup

Ilmu yang diajarkan hanya sebatas teori tanpa aplikasi hanyalah pengetahuan yang sebatas mimpi. Pelajaran yang dipahamai sebatas teks hanyalah sebua euforia. Pendidikan terpadu yang memadukan antara teori dan aplikasi, teks dan konteks harus mulai diajarkan di sekolah-sekolah agar pendidikan kita lebih bermakna.

Dengan pendidikan terpadu diharapkan akan dapat mengantarkan kepada pendidikan lebih bermakna dan bermanfaat serta akan memberikan dampak kepada terbentuknya jati diri/ karakter masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Pembangunan karakter bangsa memang harus dimulai dari membangun individu masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan terus-menerus, membangun karakter tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan. Pendidikan menjadi motor dalam upaya perbaikan dan pembentukan mental karakter bangsa yang sesungguhnya, pendidikan terpadu merupakan solusi alternatif dalam upaya membangun jati diri bangsa. Jika itu dapat dilaksanakan pendidikan akan mampu membangun karakter kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Kartono, St. *Menembus pendidikan yang tergadai*, Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Kompas, *Pembentukan karakter bangsa: hendaknya berangkat dari budaya lokal*,
Senin 24 Januari 2000
- _____, *Membangun karakter bangsa lewat pendidikan*; Selasa 7 Maret 2000
- _____, *Lembaga pendidikan gagal dalam membangun karakter bangsa*, Senin 17
Maret 2003
- Lubis Mochtar, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Jakarta: Idayu
Press, 1997.
- Muhammad Ar., *Pendidikan di alaf baru: rekonstruksi atas moralitas pendidikan*,
Yogyakarta; Prismsophie 2003